

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSES DAN KONTROL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN RAKYAT

(Studi: Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

The Influencing Factors of Access and Control Men and Women in Community Forest Resources Management

Fitria Rahmawati*) dan Melani Abdulkadir-Sunito

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

*)Email : fitria.rahma@hotmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research is to study gender of labor in productive, reproductive and social/community activities; men and women's access to and control community forest resources; and factors that influencing access and control. Respondents were households of farmer and farm-labourer who works on community forest resources. Research indicated that in reproductive, working time of women in farm-labourer households are higher than women in farmer households and in productive, working time of men in farm-labourer households are higher than men in farmer households. Factors of land holding/ownership, participation in groups and knowledges tree-crops cultivation affect access and control farmers households especially on men, women have less control of all community forest resources. No factors affect access and control of farm-labourer households over community forest resources.

Keywords: access and control, community forest resources, farm labourer household, farmers household, gender, men and women

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan profil aktivitas laki-laki dan perempuan pada kegiatan reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan, mendeskripsikan profil akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat, membandingkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat. Responden adalah petani rumah tangga dan buruh tani yang bekerja di hutan rakyat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam kegiatan reproduktif, perempuan pada rumahtangga buruh tani memiliki curahan waktu lebih tinggi daripada perempuan pada rumah tangga petani dan dalam kegiatan produktif laki-laki pada rumahtangga buruh tani memiliki curahan waktu lebih tinggi daripada laki-laki pada rumahtangga petani. Faktor penguasaan lahan rumahtangga, keikutsertaan suami-istri dalam kegiatan kelompok dan pengetahuan lokal suami istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan mempengaruhi akses kontrol pada rumahtangga petani terlebih pada laki-laki sedangkan pada rumahtangga buruh tani faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi akses dan kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Kata kunci : akses dan kontrol, gender, laki-laki dan perempuan, pengelolaan hutan rakyat, rumahtangga buruh tani, rumahtangga petani

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam Indonesia yang terluas. Hutan berfungsi menghasilkan kayu industri, kayu bakar dan arang, hasil hutan bukan kayu, menyediakan lahan untuk pemukiman dan pertanian, memberi perlindungan terhadap siklus air dalam DAS dan pengendalian erosi, tempat penyimpanan karbon, pemelihara keanekaragaman hayati dan habitat, serta objek ekoturisme dan rekreasi alam (Gardner dan Engelman 1999 dalam Suhendang

2002). Pada tahun 2009 luas kawasan hutan Indonesia sebesar 137 090 468.18 ha (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan-KeMenHut RI 2009).

Pengelolaan hutan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah (melalui Perum Perhutani), swasta dan masyarakat lokal di sekitar hutan. Pada tahun 1995 Perum Perhutani mengubah sistem pengelolaan hutan dengan pemberdayaan masyarakat melalui hutan rakyat. Pembangunan hutan rakyat diharapkan memberi manfaat ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan, menyediakan lapangan kerja, dan memacu pembangunan daerah serta

manfaat ekologi yaitu mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah, dan menjaga keseimbangan tata air (Romansah 2007). Hingga tahun 2004 luas hutan rakyat mencapai 1 568 415.6 ha (1.1 persen dari total luas kawasan hutan Indonesia) dengan potensi kayu sebesar 39 416 557.5 m³ (Sihombing 2011).

Keikutsertaan perempuan dalam program pembangunan kurang diperhatikan. Pembangunan yang ada belum menjangkau perempuan sepenuhnya. Perempuan masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Sayogyo 1986). Mugnieszah (1995) menyatakan bahwa program yang telah dilaksanakan pemerintah tidak menyentuh rumahtangga perempuan. Studi gender dalam pertanian, menemukan bahwa sekalipun kontribusi perempuan terhadap usaha tani cukup nyata, bahkan lebih besar dibanding laki-laki, namun mereka belum memiliki akses dan kontrol yang sebanding dengan laki-laki terhadap informasi dan teknologi.

Hal ini terjadi karena perempuan tidak menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan penyuluhan, sementara laki-laki sebagai anggota kelompok tani tidak semuanya berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan istri. Selain itu, intervensi dari berbagai instansi, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan serta pengaruh adat budaya masyarakat menjadi faktor penting lain yang menjadikan kurangnya melibatkan perempuan dalam program pembangunan. Tamyis (2006) menyebutkan faktor yang juga berpengaruh adalah peraturan mengenai jalannya suatu program dan pengetahuan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kartasubrata et al. (1995) menunjukkan hasil penelitian terhadap program perhutanan sosial selama kurun waktu pelaksanaan tahun 1984 sampai 1992 yaitu perempuan tidak diikutsertakan secara resmi dalam program. Mereka tidak ikut serta dalam pertemuan Kelompok Tani Hutan (KTH), untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelatihan dan pengambilan keputusan meskipun ikut terlibat dalam kegiatan usahatani tanaman hutan dan tanaman pertanian di lahan andil program perhutanan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharjito dan Sarwiti (1997) mengenai status perempuan dalam rumahtangga penyadap getah pinus pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki pembagian kerja yang jelas dalam kegiatan produksi dan pasca produksi karena kegiatan di dalam hutan rakyat didominasi oleh laki-laki. Mitchell et al. (2007) menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan hutan sangat penting, salah satunya karena peran perempuan secara tradisional sebagai penyedia bahan makanan bagi keluarga yang harus dipenuhi dari hasil hutan.

Begitu besarnya peran hutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di sekitar hutan, menjadi penting untuk melihat siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan akses serta kontrol mereka dalam kegiatan kehutanan khususnya hutan rakyat. Penelitian ini dibutuhkan untuk melihat lebih lanjut bagaimana konteks keterlibatan perempuan dengan tidak melepaskan analisis terhadap keterlibatan laki-laki atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan khususnya hutan rakyat. Hal ini penting untuk dikaji sebagai upaya lanjutan penelitian Suharjito dan Sarwiti pada tahun 1997 mengenai hutan

rakyat. Bagaimana akses dan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat dan bagaimana faktor penguasaan lahan rumahtangga, keikutsertaan suami-istri di dalam kegiatan kelompok, dan pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya mempengaruhi perbedaan akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan.

Pertanyaan Penelitian

Terkait dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil aktivitas laki-laki dan perempuan pada kegiatan reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan?
- 2) Bagaimana profil akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Kampung Kebon Kopi, Desa Gunung Bunder II. Tujuan penelitian adalah: 1) Mendeskripsikan profil aktivitas laki-laki dan perempuan pada kegiatan reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan. 2) Mendeskripsikan profil akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat. 3) Membandingkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain: 1) Peneliti, sebagai media mengasah ilmu sains komunikasi dan pengembangan masyarakat mengenai analisis gender dalam pengelolaan hutan rakyat. 2) Akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai analisis gender dalam pengelolaan hutan. 3) Penentu kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam program pengelolaan hutan berbasis kesetaraan gender.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Hutan Rakyat dan Pengelolaannya

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 ha. Menurut Awang (2007) istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dalam program-program pembangunan kehutanan di Indonesia. UU Pokok Kehutanan Tahun 1967 dan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 mengemukakan istilah mengenai hutan rakyat disamakan dengan terminologi hutan milik. Di Jawa, hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan "Karang Kitri". Pada skala nasional, pengembangan hutan rakyat berada di bawah payung program penghijauan. Program ini dimulai sejak tahun 1960-an saat Pekan Raya Penghijauan I diadakan pada tahun 1961. Sampai saat ini, hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui

secara formal oleh pemerintah maupun tanah milik yang diakui pada tingkat lokal.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/kpts-11/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 persen dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak 500 tanaman. Secara riil hutan rakyat adalah hutan atau tanaman berkayu yang tumbuh pada lahan milik masyarakat, baik pada lahan yang berupa pekarangan (di sekitar rumah/pemukiman), lahan yang berupa tegalan (terpisah dari rumah, biasanya untuk penanaman palawija), dan lahan yang berupa hutan atau sering juga disebut "wono" (seperti tegalan tapi umumnya berada agak jauh dari pemukiman dan tanahnya biasanya kurang subur, sehingga palawija umumnya tidak ditanam lagi ditempat ini).

Bentuk, Pola, dan Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Kegiatan pengembangan hutan rakyat di Indonesia pada dasarnya ada dua bentuk:

- Penanaman pohon yang bersifat swadaya.
- Penanaman pohon di atas lahan milik karena ada stimulasi dari program pemerintah seperti penghijauan dan gerakan sejuta pohon.

Dephut (2004) mengemukakan bahwa penanaman hutan rakyat dapat dilakukan dengan cara:

a. Sistem Tumpang Sari

Sistem tumpang sari adalah suatu teknis penanaman yang dilaksanakan dengan menanam tanaman semusim dan tanaman sela diantara larikan tanaman pokok (kayu-kayuan/MPTS), biasanya dilaksanakan di daerah yang pemilikan tanahnya sempit dan berpenduduk padat, tanahnya masih cukup subur dan topografi datar atau landai.

b. Sistem Cemplongan

Sistem cemplongan adalah suatu teknis penanaman dengan pembersihan lapangan tidak secara total (pembersihan lapangan hanya dilakukan di sekitar tempat yang akan ditanam) yang diterapkan pada lahan miring yang tanahnya peka erosi dan penduduknya jarang dan pada lahan yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman (lahan tidak cocok untuk kegiatan tumpang sari).

Pola hutan rakyat berdasarkan jenis tanaman yang mendominasi menurut Sumedi (n.d.) digolongkan menjadi enam macam:

1. Pola tanaman pangan.
2. Pola tanaman silvopastur (hijauan makanan ternak).
3. Pola tanaman kayu bakar.
4. Pola tanaman hortikultura (buah-buahan).
5. Pola tanaman perdagangan/industri (tanaman perdagangan).
6. Pola tanaman kayu-kayuan (bahan bangunan/kayu perkakas).

Friday et al. (1999) dalam Suwardi (2010) menyatakan bahwa pengelolaan hutan rakyat seperti agroforestry terdiri dari:

1. Pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih untuk ditanami kayu milik rakyat sebaiknya dipilih di kawasan-kawasan yang tidak dapat dijadikan lahan untuk pertanian secara permanen. Apabila di lahan-lahan tersebut sudah ada tanaman-tanaman yang berupa tanaman kayu atau buah-buahan, maka tanaman kayu dapat dilaksanakan sebagai tanaman sisipan diantara tanaman lain yang sudah ada, sehingga seluruh kebun akan menjadi lebih produktif.
2. Persiapan lahan. Tanah-tanah yang akan ditanami tanaman kayu pada umumnya berupa tanah yang telah berupa kebun dan terdapat tanaman lainnya serta tidak mengandung tumbuhan liar. Apabila tanaman kayu akan ditanam bersama-sama dengan tanaman palawija dengan sendirinya persiapan lahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Pemilihan jenis kayu. Jenis kayu yang dipilih sebaiknya jenis kayu yang sudah lazim ditanam, misalnya; kayu sengon, kayu afrika, kayu mindi, dan lain-lain yang merupakan jenis kayu yang sudah dikenal dan telah memiliki pasaran yang teratur baik sebagai bahan kayu konstruksi maupun sebagai bahan kayu untuk industri.
4. Pengadaan bibit. Dapat dilaksanakan secara vegetatif dengan bibit yang berasal dari batang atau cabang dan secara generatif. Untuk pengadaan bibit secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara stek dan cangkokan pada tanaman muda, sedangkan persiapan bibit secara generatif yang berasal dari biji.
5. Pengangkutan. Mengangkut bibit dari persemaian ke lokasi penanaman perlu diperhatikan, karena pengangkutan yang tidak baik dapat menyebabkan rusaknya bibit sehingga diusahakan untuk memilih lokasi persemaian yang dekat dengan lokasi penanaman, memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun, dan kondisi tanah yang datar.
6. Penanaman. Dalam menanam bibit perlu ditetapkan jarak tanam yang tepat sesuai rencana. Apabila pohon akan ditanam bersama-sama dengan tanaman lain, maka perlu diperhatikan jarak tanam yang diatur agar tidak saling mengganggu. Penanaman sebaiknya dilakukan di musim penghujan dan diberi pupuk dasar.
7. Pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari pemupukan, penyiangan melingkar, meminimalkan persaingan, pemangkasan yang tepat, dan melindungi pohon dari hama dan penyakit.
8. Penebangan. Penebangan pohon-pohon tergantung dari beberapa faktor, yaitu tujuan penanaman, kondisi alami dari tanaman, kondisi pasar, dan cara menebang.
9. Penanaman kembali. Pada bekas pohon yang ditebang harus segera ditanami kembali, sehingga jumlah tanaman akan selalu tetap. Oleh karena itu, setiap akan melakukan penebangan petani sudah menyiapkan bibit untuk ditanam sebagai pengganti pohon yang akan ditebang.
10. Kemurnian tanaman. Penanaman kayu terutama pada usia muda dianjurkan untuk ditanam bersama dengan tanaman lain, terutama yang dianjurkan sebagai tanaman sela adalah jenis palawija, tanaman ekonomi,

umbi-umbian, dan lain-lain. Tanaman campuran tersebut hanya dapat ditanam sampai dengan daun pohonnya tidak terlalu rapat menutupi bagian bawah pohon dan sinar matahari masih tetap dapat terjangkau tanaman palawija yang ada di bawahnya.

Sistem hutan rakyat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gunung Bunder II adalah hutan rakyat dengan sistem tumpang sari yaitu adanya pergantian jenis tanam dalam setahun. Pada awal tahun ditanami sayur-sayuran kemudian di pertengahan tahun diganti dengan menanam padi-padian. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kesuburan tanah. Sistem tumpang sari ini dilakukan berbeda di setiap rumahtangga. Mereka tidak menyamakan atau menyerentakan waktu tanam. Setiap rumahtangga memiliki hak masing-masing dalam penentuan waktu tanam yang akan ditanam pada awal atau pertengahan tahun. Ini dilakukan agar tanaman mereka terhindar dari hama dan untuk menstabilkan harga jual di pasaran. Pola hutan rakyat yang ada di Desa Gunung Bunder II merupakan gabungan pola tanaman pangan (dengan banyaknya sayur-sayuran seperti kacang, tanaman singkong, dan ubi), pola tanaman kayu bakar, pola tanaman hortikultura (dengan pohon buah-buahan seperti nangka, pisang, mangga, kelapa, petai dan rambutan), dan pola tanaman kayu-kayuan (biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bangunan). Kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Kampung Kebon Kopi terdiri dari pemilihan jenis tanaman, pengadaan bibit, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, penebangan, penanaman kembali, kemurnian tanaman, dan pemasaran hasil panen.

Konsep Analisis Gender

Gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi (Vitalaya 2012). WHO (2012) mendefinisikan gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Kerangka kerja analisis gender (The Gender Analysis Framework) merupakan kerangka analisis dasar pada taraf mengumpulkan data dan kemudian dideskripsikan. Menurut Hunt yang juga diadaptasi dari Overholt (1988) dalam Handayani dan Sugiarti (2008), kerangka kerja analisis gender terdiri dari: (a) profil kegiatan, mengumpulkan atau mengambil data mengenai apa sebenarnya yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, siapa mengerjakan apa, di dalam rumahtangga dan masyarakat (pembagian kerja gender), (b) profil akses dan kontrol, mempertimbangkan apa akses yang dimiliki perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya produktif, kontrol apa yang mereka punya terhadap sumberdaya tersebut, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari penggunaan sumberdaya tersebut (siapa memiliki apa), dan (c) analisis faktor-faktor dan kecenderungan, menganalisis faktor dan kecenderungan yang mempengaruhi pembagian kerja berdasarkan gender, hubungan gender, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya, dan mana yang akan mempengaruhi kegiatan.

Analisis gender memiliki tujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kepentingan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan manfaat secara adil. Dengan teknik analisis gender dapat diketahui profil, kedudukan, dan peran perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang. Analisis gender difokuskan pada aktivitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, mengetahui apa yang berbeda diantara laki-laki dan perempuan serta bagaimana laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Salah satu teknik analisis gender yang umum digunakan untuk melihat gambaran mengenai perbedaan profil gender, akses dan kontrol adalah Analisis Harvard. Menurut Wigna et al. (2010) teknik Analisis Harvard tersusun atas tiga komponen utama, yaitu:

a. Pembagian kerja dalam keluarga maupun komunitas (masyarakat) pada umumnya dapat dilihat dari profil kegiatannya. Profil kegiatan mencakup informasi: 1) siapa (laki-laki, perempuan atau bersama) yang melakukan kegiatan (produktif, reproduktif, sosial), 2) kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan serta berapa frekuensi dan waktu dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan yang dimaksudkan mencakup kegiatan produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang menyumbang pendapatan keluarga dalam bentuk uang atau barang, misalnya: bertani, berkebun, beternak, berdagang, kerajinan tangan dsb. Kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga, misalnya: melahirkan dan mengasuh anak, pekerjaan rumahtangga, memasak, mencuci, mencari bahan bakar dsb. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang tidak terbatas pada peraturan rumahtangga, tetapi menyangkut kegiatan di masyarakat, misalnya: berorganisasi dalam kelompok tani, koperasi, PKK, dan partisipasi dalam kelompok agama dan sosial budaya.

b. Profil akses (peluang) adalah kesempatan untuk menggunakan sumberdaya ataupun hasilnya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut. Profil kontrol (penguasaan) adalah kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya. Profil akses dan kontrol mencakup siapa yang mempunyai peluang dan penguasaan terhadap: 1) sumberdaya fisik/material, misalnya tanah, modal, peralatan dsb, 2) pasar komoditi (untuk membeli dan menjual barang) dan pasar kerja, 3) sumberdaya sosial-budaya, misalnya informasi, pendidikan dan latihan, tenaga kerja dll.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan kedudukan laki-laki maupun perempuan antara lain: struktur kependudukan (migrasi, urbanisasi), kondisi ekonomi (kebijakan struktural), kondisi politik (kebijakan baru, perubahan dalam pemerintahan, konflik), pola-pola sosial budaya (perubahan gaya hidup tradisional), sistem norma yang berlaku, perundang-undangan, sistem pendidikan, lingkungan, internasional, religi dsb.

Analisis Gender dalam Pembangunan Kehutanan

Analisis gender dalam pembangunan kehutanan (Wilde dan Mattila 1995 dalam Tamyis 2006) merupakan alat untuk menganalisis keragaman dalam suatu komunitas dan implikasi dari keragaman tersebut pada pembangunan kehutanan. Beberapa hasil penelitian mengenai analisis

gender dalam pembangunan kehutanan menyebutkan bahwa (Tamyis 2006) secara umum laki-laki pada rumahtangga masih terlibat dalam kegiatan reproduktif meskipun curahan waktu yang sedikit dibanding perempuan. Pada pembagian kerja produktif lebih terlihat adanya perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, laki-laki memiliki curahan waktu lebih besar daripada perempuan. Curahan waktu dalam kegiatan aktivitas sosial cenderung lebih besar laki-laki daripada perempuan.

Akses dan kontrol yang dimiliki laki-laki lebih besar daripada perempuan terhadap kegiatan pengelolaan lahan hutan terutama pada kegiatan pengelolaan lahan, pemasaran hasil panen, menjadi pengurus dalam anggota LMDH, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan LMDH (Tamyis 2006).

Palit (2009) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya dan manfaat terdiri dari dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, luas lahan/modal dan pendapatan. Faktor eksternal mencakup intensitas mengakses informasi dan keterlibatan dalam kelompok.

Kerangka Pemikiran



Perempuan seringkali menjadi penopang perekonomian keluarga dengan kegiatannya mengelola atau mengambil hasil hutan, namun sayangnya perempuan tidak memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam program pembangunan kehutanan (Mitchell et al. 2007).

Teknik Analisis Harvard melihat peran gender dalam proyek pembangunan dengan tiga komponen dan interelasi satu sama lain antar komponen tersebut, yaitu: profil aktivitas, profil akses-kontrol dan faktor yang mempengaruhinya (Overholt et al. dalam Handayani dan Sugiarti 2008). Dalam profil aktivitas atau peran kerja, laki-laki dan perempuan pada umumnya memainkan peranan dalam tiga kegiatan yang saling terkait yaitu produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan (Simatauw 2001 dalam Tamyis 2006).

Curahan waktu kerja pada penelitian ini untuk melihat peran kerja dan menelaah kontribusi yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Profil akses dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan hutan rakyat memberi informasi sejauhmana laki-laki dan perempuan ikut serta dalam keterlibatan dan penguasaan atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Diduga faktor-faktor penguasaan lahan rumahtangga, keikutsertaan suami-istri di dalam kegiatan kelompok, dan pengetahuan lokal yang dimiliki suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan mempengaruhi perbedaan profil akses kontrol laki-laki dan perempuan atas sumberdaya di dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

PENDEKATAN LAPANGAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kebon Kopi, Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada bulan April sampai Juni 2012. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan:

1. Informasi penyuluh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) bahwa Desa Gunung Bunder II merupakan desa yang memiliki hutan rakyat yang cukup luas dibanding desa-desa lain di Kecamatan Pamijahan.
2. Informasi sekretaris desa dan aparat Desa Gunung Bunder II bahwa Kampung Kebon Kopi merupakan kampung yang memiliki hutan rakyat yang paling luas di desa, dan hutan rakyat masih dikelola secara aktif oleh masyarakat setempat.
3. Kemudahan akses menuju lokasi karena Kecamatan Pamijahan berjarak tempuh sekitar dua jam dari Kampus IPB Dramaga.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang berupa data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden berkaitan dengan tujuan penelitian. Selain kuesioner, data kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam serta untuk memperjelas gambaran tentang keadaan sosial. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam antara lain sejarah hutan rakyat, kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat dan peran responden dalam kegiatan pengelolaan. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur, catatan-catatan, dan data-data dari instansi yang dapat mendukung kelengkapan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) di Kampung Kebon Kopi yang berjumlah 538 kepala keluarga. Teknik sampling yang digunakan adalah Stratified Random Sampling.

Stratified Random Sampling adalah teknik memilih sampel

dimana populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan dari setiap lapisan dapat diambil sampel secara acak. Sifat dari populasi adalah heterogen (Singarimbun dan Effendi 1989).

Langkah-langkah penentuan sampel adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama, dari 538 kepala keluarga dipilih kepala keluarga yang bekerja aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Dari populasi tersebut didapat 363 KK yang bekerja aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Kemudian populasi distratifikasikan menjadi dua subpopulasi (lapisan) menurut pekerjaan yaitu petani dan buruh tani. Pada tahap kedua dari masing-masing subpopulasi, sampel diambil secara acak dengan rincian:

Strata I Petani, jumlah KK	122
Strata II Buruh Tani, jumlah KK	241
Jumlah Populasi	363

Jumlah sampel yang diambil adalah 30 KK, maka jumlah dari masing-masing stratum I dan II diambil secara proporsional dengan rumus:

Keterangan: = target jumlah sampel
 = jumlah populasi
 = jumlah populasi setiap strata

Maka jumlah sampel tiap strata adalah:

$$\text{Strata I Petani} = \frac{122}{363} \times 30 = 10$$

$$\text{Strata II Buruh Tani} = \frac{241}{363} \times 30 = 20$$

Unit analisa dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan responden laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang bertujuan untuk melihat peran gender di dalam rumah tangga.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner dan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan terlebih dahulu diolah kemudian ditabulasikan dan data kualitatif disajikan secara deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat kasus yang terjadi. Pengolahan data masing-masing variabel diproses dengan menggunakan software SPSS 17.0 dan Microsoft Excel 2007. Analisis gender dilakukan dengan teknik Analisis Harvard untuk melihat profil aktivitas (kegiatan reproduktif, produktif dan sosial kemasyarakatan) masyarakat dengan akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang ada di lapang.

GAMBARAN UMUM

Lokasi Desa Gunung Bunder II

Desa Gunung Bunder II termasuk dalam wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berada di punggung Gunung Salak dan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Desa ini di sebelah Utara berbatasan dengan

Desa Gunung Bunder I, sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenjolaya dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Picung.

Secara administratif, Desa Gunung Bunder II terdiri atas dua dusun. Dusun I mencakup RW 01, 04 dan 05. Dusun II mencakup RW 02, 03 dan 06. Terdapat pula jumlah kampung yang terdiri atas 11 kampung yang terdistribusi di dua dusun. Dusun I mencakup lima kampung, yaitu Kampung Gede, Pasir Kaung, Arban, Logok Nyenang dan Pasir Salam. Dusun II meliputi enam kampung, yaitu Kampung Pasar Rebo, Pasir Putih, Kebon Kopi, Ibu, Rawa dan Silih. Jarak dari Desa Gunung Bunder II ke Kota Bogor kurang lebih 60 Km. Kondisi jalan sampai dengan Gunung Bunder II relatif baik, jalan beraspal, namun lebar jalan mengalami penyempitan dari wilayah Desa Gunung Bunder I sampai dengan batas Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tersedia angkutan umum yang dapat digunakan untuk mencapai desa ini, yaitu Angkot 53 dan Angkot Gunung Bunder.

Kondisi Geografi dan Topografi

Secara geografis, Desa Gunung Bunder II terletak pada ketinggian 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang beragam yakni kemiringan lahan 8 sampai 40 persen, berbukit-bukit dengan kemiringan yang curam. Rata-rata curah hujan 197,9 mm per tahun dengan lama hujan dan penyebarannya selama 21 hari per hujan per tahun. Keberadaan hutan Perhutani yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang memiliki empat sumber mata air dimanfaatkan untuk mengairi sawah di desa ini.

Sejarah Hutan Rakyat Desa Gunung Bunder II

Hutan rakyat di Desa Gunung Bunder II merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hutan secara turun temurun. Pada tahun 1930-an lahan tersebut digadaikan oleh masyarakat kepada tuan-tuan tanah yaitu Belanda. Saat itu tanaman kayu yang banyak ditanam adalah pohon rasamala (*Altingia excels*), jeungjing (*Albizia falcataria*) dan petai.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1949, pemegang kuasa atas hutan tersebut berpindah tangan pada Kehutanan Republik Indonesia. Pada masa itu, masyarakat sekitar diperintahkan untuk membuat bedeng-bedeng yang akan ditanami jeungjing (*Albizia falcataria*) dan mahoni (*Swietenia*). Pada tahun 1952 Kehutanan melaksanakan program penghijauan gunung dengan menanam pohon rasamala, damar, akasia, dan pinus seluas ± 50 ha. Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan tanah di sela pohon-pohon penghijauan itu dengan menanam sayuran atau tanaman lainnya di sela-sela tanaman kayu dan diwajibkan memelihara pohon-pohon kayu tersebut. Tetapi penanaman hanya diperbolehkan sampai tinggi pohon kayu mencapai sekitar 3 m lebih (untuk damar dan mahoni memerlukan waktu 4 tahun, dan sengo 5 tahun) atau diukur dengan masuknya cahaya matahari.

Tahun 2007, kuasa hutan dialihkan dari Kehutanan ke Perhutani. Pada masa itu Perhutani memberikan sebagian lahan untuk dijadikan hutan rakyat. Sebagian lahan hutan dijadikan hutan rakyat untuk masyarakat sekitar. Sebagian lagi dijadikan hutan lindung atau Taman Nasional. Lahan yang dijadikan hutan rakyat seluas ± 26,5 ha atau 5,9

persen dari luas total wilayah kampung. Hutan lindung atau taman nasional hanya boleh dikunjungi untuk wisata dan pendakian ke Gunung Salak sedangkan masyarakat sekitar tidak diperbolehkan mengakses taman nasional baik untuk pemukiman, produksi atau mengambil kayu di hutan. Perhutani membuat pembatasan berupa gapura besar untuk memisahkan antara batas hutan rakyat dengan taman nasional. Taman nasional tersebut termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Tahun 2008, diadakan program penyuluhan dan pelatihan “gerakan 1000 pohon” dari sebuah LSM yaitu MS Kaban didampingi BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) di hutan rakyat. Penyuluhan dan pelatihan tersebut meliputi cara pembibitan, penyemaian dan penanaman tanaman kayu kepada masyarakat Desa Gunung Bunder II. Program tersebut memberikan bibit berupa biji dari berbagai macam tanaman kayu seperti sengon, mahoni, dan damar ditanam di lahan-lahan penduduk.

PROFILAKTIVITAS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN REPRODUKTIF, PRODUKTIF, DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kegiatan Reproduksi

Perempuan merupakan pelaku utama pada hampir semua kegiatan reproduktif (Tabel 1). Beberapa kegiatan reproduktif di dalam rumahtangga petani, seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, berbelanja, dan mengurus anak, laki-laki tidak melakukan kegiatan tersebut. Tabel 7 memperlihatkan persentase pelaku suami-istri dalam kegiatan reproduktif pada rumahtangga petani dan buruh tani. Pada rumahtangga petani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri.

Tabel 1. Persentase Pelaku (Suami-Istri) menurut Kegiatan Reproduksi Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Pelaku* (%)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Memasak	0.0	100.0	0.0	100.0
Mencuci piring	0.0	100.0	0.0	100.0
Mencuci baju	0.0	100.0	0.0	100.0
Membersihkan rumah	0.0	90.0	0.0	100.0
Berbelanja	0.0	40.0	0.0	40.0
Mencari kayu bakar	40.0	0.0	100.0	0.0
Mengurus anak	0.0	80.0	20.0	85.0

Keterangan: Jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Laki-laki pada rumahtangga petani hanya membantu

mencari kayu bakar sebanyak 40,0 persen sedangkan laki-laki pada rumahtangga buruh tani yaitu 100,0 persen. Laki-laki pada rumahtangga petani tidak ikut membantu mengurus anak 0,0 persen tetapi pada rumahtangga buruh tani terdapat 20,0 persen laki-laki yang masih ikut membantu dalam mengurus anak. Perempuan pada rumahtangga petani dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah sebanyak 90,0 persen sedangkan pada rumahtangga buruh tani 100,0 persen. Kegiatan mengurus anak dilakukan oleh perempuan pada rumahtangga petani sebanyak 80 persen dan pada perempuan rumahtangga buruh tani 85,0 persen. Perempuan pada rumahtangga petani maupun buruh tani tidak melakukan kegiatan mencari kayu bakar. Kegiatan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”, karena memerlukan tenaga besar dan tempat mencari kayu bakar jauh di hutan.

Tabel 2. Curahan Waktu Kerja menurut Kegiatan Reproduksi Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Curahan Waktu* (jam/hari)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Memasak	0,0	1,4	0,0	1,6
Mencuci piring	0,0	0,4	0,0	0,3
Mencuci baju	0,0	1,2	0,0	1,3
Membersihkan rumah	0,0	0,4	0,0	0,4
Berbelanja	0,0	0,3	0,0	0,3
Mencari kayu bakar	0,5	0,0	1,3	0,0
Mengurus anak	0,0	0,9	0,2	1,1
Total (jam/hari)	0,5	4,6	1,5	5,0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Curahan waktu kerja pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa total waktu kerja kegiatan reproduktif pada rumahtangga petani untuk laki-laki sebesar 0.5 jam/hari dan perempuan 4.6 jam/hari. Curahan waktu kerja laki-laki pada rumahtangga buruh tani sebesar 1.5 jam/hari dan perempuan 5.0 jam/hari.

Pada kegiatan reproduktif, curahan waktu kerja perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih besar dibanding perempuan pada rumahtangga petani. Hal ini karena pengalokasian waktu oleh perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih besar dalam kegiatan reproduktif. Curahan waktu kerja laki-laki pada rumahtangga buruh tani dalam kegiatan reproduktif lebih besar dibanding curahan waktu kerja laki-laki pada rumahtangga petani. Hal ini karena laki-laki pada rumahtangga buruh tani masih melakukan kegiatan mengurus anak untuk membantu istri-istri mereka ketika sedang bekerja. Selain itu untuk kegiatan mencari kayu bakar, rumahtangga buruh tani masih menggunakan kompor kayu dalam memasak sedangkan pada rumahtangga petani, sebagian besar rumahtangga sudah menggunakan kompor minyak atau kompor gas.

Kegiatan Produktif

Kegiatan produktif yang dikerjakan oleh rumahtangga petani dan buruh tani adalah kegiatan pertanian berupa pengelolaan hutan dan non hutan (pengelolaan sawah dan peternakan) serta kegiatan non pertanian (perdagangan, wiraswasta dan PNS). Tabel 9 memperlihatkan persentase pelaku suami-istri dalam kegiatan produktif pada rumahtangga petani dan buruh tani. Pada rumahtangga petani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri.

Perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih banyak melakukan kegiatan pertanian pengelolaan hutan sebanyak 65,0 persen dibanding perempuan pada rumahtangga petani yaitu 50,0 persen. Laki-laki pada rumahtangga buruh tani lebih banyak melakukan kegiatan pengelolaan sawah yaitu 85,0 persen dibanding laki-laki pada rumahtangga petani yaitu 70,0 persen. Hal ini karena sebagian rumahtangga petani menyewa tenaga penggarap untuk menggarapi lahan persawahan mereka. Pada kegiatan peternakan hanya dilakukan oleh rumahtangga petani, kegiatan tersebut meliputi mencari rumput untuk pakan ternak dan memberi makan ternak setiap pagi dan sore hari, untuk laki-laki sebanyak 70,0 persen dan perempuan 20,0 persen. Hewan ternak yang dipelihara adalah kambing dan hanya dijual ketika lebaran haji tiba. Tidak adanya rumahtangga buruh tani dalam kegiatan peternakan karena harga beli untuk satu ekor kambing sangat mahal selain itu tidak ada waktu untuk memberi pakan ternak karena waktu produktif sudah dihabiskan untuk menggarap di lahan orang lain.

Tabel 3. Persentase Pelaku (Suami-Istri) menurut Kegiatan Produktif Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Pelaku*(%)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Pertanian Pengelolaan Hutan	100.0	50.0	100.0	65.0
Pertanian Non Hutan				
• Pengelolaan sawah	70.0	60.0	85.0	65.0
• Peternakan	70.0	20.0	0.0	0.0
Non Pertanian				
• Perdagangan	20.0	40.0	10.0	20.0
• Wiraswasta	20.0	20.0	15.0	10.0
• PNS	10.0	0.0	0.0	0.0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Pada kegiatan perdagangan untuk perempuan pada

rumahtangga petani adalah membuka warung di rumah sebanyak 40,0 persen dan untuk perempuan pada rumahtangga buruh tani 20,0 persen. Perdagangan yang dilakukan laki-laki pada rumahtangga petani adalah menjual hasil panen sebanyak 20,0 persen. Laki-laki pada rumahtangga buruh tani yang melakukan kegiatan perdagangan sebanyak 10,0 persen dimana sistem perdagangan yang mereka lakukan sifatnya tidak tetap. Mereka lebih banyak menjual jasa untuk menjual barang dagangan orang lain untuk dijual kembali dan biasanya barang dagangan itu berupa hasil-hasil panen. Kegiatan wiraswasta yang dilakukan laki-laki pada rumahtangga petani adalah usaha mebel dan bengkel sebanyak 20,0 persen sedangkan untuk perempuan 20,0 persen. Perempuan pada rumahtangga petani berwiraswasta membuat kue yang sifatnya tidak tetap karena dilakukan hanya jika ada pesanan. Pada rumahtangga buruh tani terdapat 15,0 persen laki-laki dan 10,0 persen perempuan berwiraswasta. Kegiatan wiraswasta yang dilakukan adalah membuat pengki dengan anyaman dari bambu. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh suami-istri dan sifatnya tidak tetap karena dilakukan ketika ada pesanan saja.

Tabel 4. Curahan Waktu Kerja menurut Kegiatan Produktif Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Curahan Waktu* (jam/hari)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Pertanian Pengelolaan Hutan	1.0	0.3	3.2	0.7
Pertanian Non Hutan				
• Pengelolaan sawah	3.5	0.9	2.3	1.9
• Peternakan	0.6	0.3	0.0	0.0
Non Pertanian				
• Perdagangan	0.2	1.4	0.1	0.9
• Wiraswasta	0.1	0.2	0.1	0.1
• PNS	0.3	0.0	0.0	0.0
Total (jam/hari)	5.7	3.1	5.7	3.6

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Curahan waktu kerja laki-laki pada rumahtangga buruh tani sama besar dengan laki-laki pada rumahtangga petani yaitu 5,7 jam/hari hanya terdapat perbedaan alokasi waktu yang dilakukan pada setiap kegiatan (Tabel 10). Curahan waktu kerja perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih tinggi yaitu 3,6 jam/hari dibanding perempuan pada rumahtangga petani yaitu 3,1 jam/hari. Hal ini karena perempuan pada rumahtangga buruh tani banyak mencurahkan waktunya pada kegiatan pengelolaan hutan dan sawah. Setiap hari rata-rata perempuan pada rumahtangga buruh tani harus bekerja sebagai penggarap di lahan orang lain untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Pada rumahtangga buruh tani baik suami maupun istri bersama-sama bekerja untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan beberapa rumahtangga petani ada yang menyewa tenaga penggarap untuk menggarapi lahannya dan istri mereka hanya bekerja menjadi ibu rumahtangga.

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi pengajian, arisan, rapat desa, pernikahan, kerja bakti, pertemuan kelompok, posyandu, dan rajaban. Kegiatan pengajian adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik pada rumahtangga petani maupun buruh tani (Tabel 5). Tabel 5 memperlihatkan persentase pelaku suami-istri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada rumahtangga petani dan buruh tani. Pada rumahtangga petani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase pelaku dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri.

Laki-laki tidak mengikuti kegiatan arisan karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh perempuan bersama dengan kegiatan pengajian. Perempuan tidak mengikuti kegiatan rapat desa baik ditingkat RW maupun di tingkat desa dan pertemuan kelompok karena merasa tidak berkepentingan pada kegiatan semacam itu. Hal ini karena adanya anggapan di masyarakat Kampung Kebon Kopi bahwa laki-laki sebagai kepala rumahtangga sekaligus pihak yang mewakili rumahtangga untuk berbagai kegiatan di tingkat kemasyarakatan.

Tabel 5. Persentase Pelaku (Suami-Istri) menurut Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Pelaku*(%)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Pengajian	100.0	100.0	100.0	100.0
Arisan	0.0	10.0	0.0	0.0
Rapat desa	10.0	0.0	0.0	0.0
Pernikahan	30.0	30.0	10.0	10.0
Kerja bakti	20.0	0.0	15.0	0.0
Pertemuan kelompok	0.0	0.0	0.0	0.0
Posyandu	0.0	10.0	0.0	0.0
Rajaban	0.0	0.0	30.0	30.0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Pada kegiatan kerja bakti yang mengikuti hanyalah laki-laki karena pekerjaan yang dilaksanakan pada saat kerja bakti umumnya merupakan pekerjaan "kasar" dan berat sehingga membutuhkan banyak tenaga dan biasanya perempuan hanya membantu menyediakan makanan. Pada saat penelitian dilakukan kegiatan kerja bakti sedang dilakukan oleh masyarakat RT 02 dan RT 04. Kegiatan ini adalah membersihkan jalan di sekitar RT 02 dan RT 04 yang dilakukan pada hari minggu. Kegiatan posyandu hanya dilakukan oleh perempuan pada rumahtangga

petani sebanyak 10,0 persen dan yang melakukan kegiatan tersebut adalah anggota PKK di Desa Gunung Bunder II.

Tabel 6 memperlihatkan bahwa curahan waktu kerja terbesar pada kegiatan sosial kemasyarakatan dalam rumahtangga petani maupun buruh tani adalah kegiatan pengajian yaitu 0,6 jam/hari dan 0,4 jam/hari untuk laki-laki dan perempuan pada rumahtangga petani, 0,7 jam/hari dan 0,3 jam/hari untuk laki-laki dan perempuan pada rumahtangga buruh tani. Besarnya curahan waktu laki-laki dalam kegiatan pengajian disebabkan oleh jadwal pengajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali dimulai setelah shalat magrib sampai jam 12 malam. Pada perempuan jadwal pengajian dilaksanakan setiap seminggu sekali dimulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Perbedaan curahan waktu pada laki-laki dan perempuan karena pada masing-masing individu dalam mengalokasikan waktu berbeda.

Selain itu, Tabel 6 juga menunjukkan bahwa laki-laki pada rumahtangga buruh tani dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki curahan waktu kerja lebih besar dibanding laki-laki pada rumahtangga petani. Hal ini karena alokasi waktu pada kegiatan pengajian rata-rata pada laki-laki buruh tani lebih tinggi dibanding laki-laki pada rumahtangga petani. Sama halnya dengan perempuan pada rumahtangga petani yang memiliki curahan waktu kerja lebih besar dibanding perempuan pada rumahtangga buruh tani karena alokasi waktu pada kegiatan pengajian pada perempuan rumahtangga petani rata-rata lebih tinggi dari perempuan pada rumahtangga buruh tani. Perbedaan alokasi waktu ini salah satunya disebabkan oleh kesibukan pada aktivitas-aktivitas lain.

Tabel 6. Curahan Waktu Kerja menurut Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Curahan Waktu (jam/hari)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Pengajian	0,6	0,4	0,7	0,3
Arisan	0,0	0,0	0,0	0,0
Rapat desa	0,0	0,0	0,0	0,0
Pernikahan	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerja bakti	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertemuan kelompok	0,0	0,0	0,0	0,0
Posyandu	0,0	0,0	0,0	0,0
Rajaban	0,0	0,0	0,0	0,0
Total (jam/hari)	0,6	0,4	0,7	0,3

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Perbandingan rata-rata curahan waktu kerja yang dimiliki laki-laki dan perempuan pada rumahtangga petani dan buruh tani dalam kegiatan reproduktif, produktif, dan sosial kemasyarakatan ditunjukkan pada Tabel 7. Total curahan waktu kerja yang dilakukan laki-laki pada rumahtangga buruh tani dalam satu hari untuk kegiatan reproduktif,

produktif, dan sosial kemasyarakatan rata-rata 7,9 jam/hari lebih besar dibanding curahan waktu kerja yang dimiliki laki-laki pada rumahtangga petani dalam satu hari laki-laki yaitu 6,8 jam/hari. Hal ini karena curahan waktu kerja yang dimiliki laki-laki pada rumahtangga buruh tani lebih tinggi pada kegiatan reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Laki-laki pada rumahtangga buruh tani masih banyak berkontribusi pada kegiatan reproduktif dalam hal mencari kayu bakar dan mengurus anak dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan alokasi waktu untuk kegiatan pengajian lebih besar.

Total curahan waktu kerja yang dilakukan perempuan pada rumahtangga buruh tani dalam satu hari untuk kegiatan reproduktif, produktif, dan sosial kemasyarakatan rata-rata 8,9 jam/hari lebih besar dibanding curahan waktu kerja yang dimiliki perempuan pada rumahtangga petani dalam satu hari yaitu 8,1 jam/hari. Hal ini karena curahan waktu kerja yang dimiliki perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih tinggi pada reproduktif dan produktif. Alokasi waktu yang dilakukan perempuan pada rumahtangga buruh tani lebih tinggi pada kegiatan reproduktif dan untuk kegiatan produktif, rata-rata perempuan pada rumahtangga buruh tani ikut bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 7. Rata-rata Curahan Waktu Kerja menurut Kegiatan Reproduksi, Produktif, dan Sosial Kemasyarakatan (jam/hari) Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Kegiatan	Curahan Waktu* (jam/hari)			
	Rumahtangga Petani		Rumahtangga Buruh Tani	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Reproduktif	0.5	4.6	1.5	5.0
Produktif	5.7	3.1	5.7	3.6
Sosial Kemasyarakatan	0.6	0.4	0.7	0.3
Total (jam/hari)	6.8	8.1	7.9	8.9

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

PROFIL AKSES DAN KONTROL DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Profil Akses

Akses dalam kegiatan hutan rakyat adalah ikut serta menggunakan sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat yang ada di Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II. Akses pada kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat meliputi kegiatan pemilihan jenis kayu yang akan ditanam (keterlibatan dalam penanaman jenis kayu yang akan ditanam di lahan). Jenis kayu yang biasanya ditanam yaitu kayu sengon, kayu afrika, damar, suren, rasamala, meranti, dan lain-lain yang memiliki pasaran teratur baik sebagai bahan kayu konstruksi maupun bahan kayu untuk industri. Akses pada kegiatan pengadaan bibit adalah keterlibatan dalam membuat pembibitan yang akan ditanam.

Akses pada kegiatan pengangkutan bibit adalah keterlibatan dalam mengangkut pemindahan bibit ke persemaian. Adapun pada kegiatan penanaman bibit ke lahan meliputi keterlibatan dalam menanam, mencangkul, menyiapkan lahan, pembersihan lahan, pembuatan lubang-lubang, dan meletakkan bibit ke setiap lubang. Akses pada kegiatan pemeliharaan tanaman adalah keterlibatan dalam membersihkan tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar pohon seperti penjarangan dan penyiangan tanaman.

Akses pada kegiatan penebangan tanaman kayu adalah keterlibatan dalam proses penebangan dan biasanya dilakukan oleh laki-laki sedangkan untuk kegiatan penanaman kembali adalah keterlibatan dalam mencari bibit tanaman kayu yang baru. Akses pada kegiatan kemurnian tanaman mencakup keterlibatan dalam menanam tanaman sela sedangkan pada pemasaran hasil panen meliputi keterlibatan dalam menjual hasil panen. Setiap kegiatan yang terkait dalam pengelolaan hutan rakyat terdapat sumberdaya-sumberdaya didalamnya. Sumberdaya tersebut berupa lahan, alat kerja (cangkul, parit, gergaji dll), input pertanian (bibit, pupuk, dan pestisida), tenaga kerja (tenaga kerja sendiri atau sewa), modal/pinjaman, pelatihan, dan pemasaran (Tabel 8).

Tabel 8. Persentase Suami-Istri dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Rakyat menurut Akses dan Kontrol Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Sumberdaya terkait Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat	Rumahtangga Petani*(%)				Rumahtangga Buruh Tani*(%)			
	Akses		Kontrol		Akses		Kontrol	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
Lahan	100	50	100	0	100	65	0	0
Alat kerja	90	50	100	0	100	65	0	0
Input Pertanian	100	50	100	0	100	65	0	0
Tenaga Kerja	80	60	100	0	100	65	0	0
Modal/pinjaman	100	50	100	0	100	65	0	0
Pelatihan	100	50	100	0	100	65	100	0
Pemasaran	100	0	100	30	100	10	5	0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Akses terhadap sumberdaya meliputi menggunakan lahan, menggunakan alat kerja, menggunakan dan memakai input pertanian, melakukan pekerjaan sendiri, menggunakan modal/pinjaman, dan menjual hasil panen. Tabel 14 memperlihatkan persentase akses suami-istri dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat pada rumahtangga petani dan buruh tani. Pada rumahtangga petani persentase dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri.

Semua laki-laki pada rumahtangga petani dan buruh tani memiliki akses atas sumberdaya pada kegiatan

pengelolaan hutan rakyat. Hanya saja tidak semua laki-laki pada rumahtangga petani akses atas sumberdaya alat kerja dan tenaga kerja yaitu 90,0 persen dan 80,0 persen. Hal ini karena beberapa rumahtangga petani menyewa tenaga kerja dari luar untuk menggarap lahan. Perempuan pada rumahtangga buruh tani terdapat 10,0 persen akses atas sumberdaya pemasaran sedangkan perempuan pada rumahtangga petani tidak memiliki akses atas sumberdaya pemasaran yaitu 0,0 persen karena mereka tidak ikut serta menjual hasil-hasil panen baik pada tanaman kayu maupun tanaman sela.

Profil Kontrol

Kontrol dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat adalah menguasai sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat yang ada di Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II. Kontrol pada kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat meliputi kegiatan pemilihan jenis kayu yang akan ditanam (menentukan jenis kayu yang akan ditanam di lahan). Kontrol pada kegiatan pengadaan bibit adalah menentukan kapan dan dimana bibit akan ditanam.

Kontrol pada kegiatan pengangkutan bibit meliputi memutuskan kapan pemindahan bibit ke persemaian sedangkan pada kegiatan penanaman bibit ke lahan meliputi memutuskan cara dan waktu penanaman bibit. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi menentukan cara pemeliharaan tanaman kayu dan seberapa sering dilakukan. Kontrol pada kegiatan penebangan tanaman kayu adalah menentukan waktu penebangan. Pada kegiatan penanaman kembali, kemurnian tanaman, dan pemasaran hasil panen, kontrol tersebut meliputi menentukan bibit baru yang akan ditanam, menentukan jenis tanaman sela, pola tumpang sari, dan waktu tanam serta panen dan menentukan ke mana hasil panen akan dijual dan harganya. Setiap kegiatan yang terkait dalam pengelolaan hutan rakyat terdapat pula sumberdaya-sumberdaya didalamnya. Sumberdaya tersebut berupa lahan, alat kerja (cangkul, parit, gergaji dll), input pertanian (bibit, pupuk, dan pestisida), tenaga kerja (tenaga kerja sendiri atau sewa), modal/pinjaman, pelatihan, dan pemasaran (Tabel 8). Kontrol terhadap sumberdaya adalah memiliki lahan, memiliki peralatan pertanian, memiliki dan membeli input pertanian, menyewa atau menyuruh orang atau tenaga kerja, memiliki dan menentukan modal/pinjaman, menyuruh dan menentukan waktu pelatihan, serta menyuruh dan menentukan harga jual.

Tabel 8 memperlihatkan persentase kontrol suami-istri dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat pada rumahtangga petani dan buruh tani. Pada rumahtangga petani persentase dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri. Semua laki-laki pada rumahtangga petani memiliki kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat yaitu 100,0 persen, sedangkan laki-laki pada rumahtangga buruh tani hanya memiliki kontrol atas sumberdaya pelatihan dan pemasaran yaitu 100,0 persen dan 5,0 persen karena rata-rata semua kontrol atas sumberdaya dikuasai oleh pemilik lahan. Terdapat 30,0 persen perempuan pada rumahtangga petani memiliki kontrol atas sumberdaya pemasaran sedangkan perempuan pada rumahtangga buruh tani tidak memiliki kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat karena semua kontrol dikuasai

oleh pemilik lahan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSES DAN KONTROL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN RAKYAT

Penguasaan Lahan Rumahtangga

Penguasaan lahan dibedakan menjadi dua, yaitu rendah jika penguasaan lahan dalam rumahtangga < 1400 m² dan tinggi jika penguasaan lahan dalam rumahtangga ≥ 1400 m². Areal lahan terkecil yang ada di Kampung Kopi berkisar ± 200 m² dan paling luas berkisar ± 3000 m². Dari hasil observasi sudah banyak lahan yang beralih fungsi menjadi lokasi penginapan. Hal ini menyebabkan kepemilikan dan penguasaan lahan di tingkat rumahtangga semakin kecil. Persentase penguasaan lahan rumahtangga pada rumahtangga petani dihitung 100 persen dari 10 KK sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase dihitung 100 persen dari 20 KK.

Tabel 9. Persentase menurut Penguasaan Lahan Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Penguasaan Lahan	Rumahtangga Petani*(%)	Rumahtangga Buruh Tani*(%)
Rendah (< 1400 m ²)	30,0	100,0
Tinggi (≥ 1400 m ²)	70,0	0,0
Total	100,0	100,0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 dan Buruh Tani 20 KK

Penguasaan lahan pada Tabel 9 merupakan lahan garapan (kebun yang ditanami tanaman kayu-kayuan) yang digarap oleh suami istri baik berupa milik sendiri maupun dari sewa, bagi hasil (maro), dan gadai. Penguasaan lahan rendah pada rumahtangga petani yaitu 30 persen dan penguasaan lahan tinggi yaitu 70 persen. Tingginya penguasaan lahan pada rumahtangga petani karena lahan tersebut adalah lahan yang mereka miliki sendiri dan berupa lahan-lahan warisan dari orang tua terdahulu dan anak laki-laki pada keluarga petani biasanya mendapatkan warisan tanah yang jauh lebih besar daripada perempuan. Semua rumahtangga buruh tani menguasai lahan rendah.

Hal ini karena beberapa lahan pada rumahtangga buruh tani adalah lahan warisan dari orang tua perempuan. Rata-rata status laki-laki pada rumahtangga buruh tani bukanlah orang asli dari Kampung Kebon Kopi, banyak diantaranya merupakan orang dari luar desa yang menikah dengan perempuan Kampung Kebon Kopi.

Tabel 10 memperlihatkan pengaruh penguasaan lahan rumahtangga dengan akses yang dimiliki rumahtangga petani dan buruh tani. Penguasaan lahan dihitung dengan membagi antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumahtangga. Hal ini untuk melihat bagaimana pengaruh penguasaan pada laki-laki dan perempuan. Hipotesis pada pengaruh penguasaan lahan rumahtangga terhadap akses atas sumberdaya adalah semakin tinggi penguasaan lahan rumahtangga yang dimiliki maka semakin tinggi akses rumahtangga atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Tabel 10 memperlihatkan bahwa faktor

penguasaan lahan rumahtangga hanya mempengaruhi rumahtangga petani dan lebih tepatnya pada laki-laki. Pengaruh penguasaan lahan pada rumahtangga petani sangat besar karena jumlah luas lahan yang dikuasai mempengaruhi banyaknya sumberdaya-sumberdaya yang dapat diakses.

Tabel 10. Persentase Penguasaan Lahan Rumahtangga menurut Akses Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Pen-guasaan Lahan	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Akses*(%)				Akses*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	40	30	0	0	35	100	65
Tinggi	0	10	70	50	0	0	0	0
Total	0	50	100	100	0	0	100	0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Pada rumahtangga petani, jika sebuah rumahtangga memiliki jumlah lahan sedikit, maka akses terhadap sumberdaya yang ada terbatas pada jumlah lahan yang dimiliki saja. Pada rumahtangga buruh tani, faktor penguasaan lahan tidak mempengaruhi akses atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan. Walaupun penguasaan lahan yang dimiliki oleh rumahtangga buruh tani tergolong rendah, tetapi dalam hal akses, mereka lebih banyak mengakses sumberdaya dari lahan-lahan orang lain yang mereka garap.

Tabel 10. Persentase Penguasaan Lahan Rumahtangga menurut Kontrol Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok	Rumahtangga Petani*(%)		Rumahtangga Buruh Tani*(%)	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Rendah	40	90	80	100
Tinggi	60	10	20	0
Total	100	100	100	100

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Hipotesis pada pengaruh penguasaan lahan rumahtangga terhadap kontrol atas sumberdaya adalah semakin tinggi penguasaan lahan rumahtangga yang dimiliki maka semakin tinggi kontrol rumahtangga atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Tabel 17 memperlihatkan bahwa faktor penguasaan lahan rumahtangga hanya mempengaruhi rumahtangga petani dan lebih tepatnya pada laki-laki. Pengaruh penguasaan lahan pada rumahtangga petani sangat besar karena jumlah luas lahan yang dikuasai mempengaruhi banyaknya sumberdaya-sumberdaya yang mereka miliki.

Pada rumahtangga petani, jika sebuah rumahtangga memiliki jumlah lahan sedikit, maka kontrol terhadap sumberdaya yang ada terbatas pada jumlah lahan yang dimiliki saja. Pada rumahtangga buruh tani, faktor penguasaan lahan tidak mempengaruhi kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini karena semua kontrol atas sumberdaya dipegang sepenuhnya oleh pemilik lahan yang mereka garap.

Keikutsertaan Suami-Istri dalam Kegiatan Kelompok

Keikutsertaan di dalam kegiatan kelompok diukur menjadi rendah dan tinggi. Keikutsertaan tersebut meliputi keterlibatan suami-istri di dalam kelompok, intensitas menghadiri perkumpulan untuk mendapatkan informasi mengenai hutan rakyat, keikutsertaan suami dan istri pada acara-acara yang diadakan kelompok dan manfaat yang diterima dari keikutsertaan tersebut. Keikutsertaan di dalam kegiatan kelompok dilihat dari setiap individu laki-laki dan perempuan pada masing-masing rumahtangga (Tabel 11).

Keberadaan kelompok tani di Kampung Kebon Kopi kurang aktif, perkumpulan yang dilakukan biasanya dilaksanakan jika terjadi suatu permasalahan dalam pertanian atau adanya penyuluhan dari luar desa. Kelompok tani hutan yang masih aktif adalah kelompok tani makmur yang berlokasi di RW 02. Sebagian masyarakat Kampung Kebon Kopi yang aktif lebih sering berkumpul di kelompok tani makmur. Perkumpulan yang diadakan oleh kelompok tani makmur dilaksanakan setiap sebulan sekali.

Kegiatan kelompok yang diikuti adalah kegiatan-kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh ketua kelompok tani atau penyuluhan dari pihak luar desa. Manfaat yang diterima oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan di dalam kelompok adalah memperoleh informasi atau pengetahuan baru mengenai sistem pertanian, keterampilan, dan bibit.

Persentase keikutsertaan suami-istri di dalam kegiatan kelompok pada rumahtangga petani dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri.

Tabel 11. Persentase menurut Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Tahun 2012

Pen-guasaan Lahan	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Kontrol*(%)				Kontrol*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	40	30	0	100	100	0	0
Tinggi	0	60	70	0	0	0	0	0
Total	0	100	100	0	100	0	0	0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Laki-laki pada rumahtangga petani memiliki keikutsertaan

tinggi di dalam kelompok yaitu 60 persen sedangkan laki-laki pada rumahtangga buruh tani yang memiliki keikutsertaan tinggi di dalam kelompok hanya 20 persen. Keikutsertaan tinggi yang dimiliki laki-laki pada rumahtangga petani dan buruh tani adalah masyarakat yang merupakan anggota dari kelompok tani dan masih aktif mengikuti perkumpulan dan kegiatan-kegiatan yang diadakan kelompok.

Keikutsertaan rendah yang dimiliki laki-laki pada rumahtangga petani dan buruh tani merupakan masyarakat yang sebagian adalah anggota kelompok tani tapi tidak mengikuti perkumpulan dan sebagian adalah masyarakat yang memang sama sekali bukan anggota kelompok tani dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan kelompok tani. Keikutsertaan rendah banyak dimiliki oleh rumahtangga buruh tani. Rendahnya keikutsertaan yang dilakukan oleh rumahtangga buruh tani disebabkan oleh tidak adanya waktu untuk mengikuti kegiatan kelompok seperti kelompok tani.

Keikutsertaan rendah di dalam kegiatan kelompok yang dimiliki pada rumahtangga petani sebanyak 90 persen dan hanya 10 persen yang memiliki keikutsertaan tinggi sedangkan semua perempuan pada rumahtangga buruh tani memiliki keikutsertaan rendah di dalam kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok yang biasanya diikuti adalah kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani wanita seputar penyuluhan dan pelatihan cara menanam tanaman sela di sekitar tanaman kayu. Hanya 10 persen perempuan pada rumahtangga petani yang merupakan anggota dari kelompok tani wanita dan aktif mengikuti kegiatan dan untuk perempuan pada rumahtangga buruh tani tidak ada sama sekali atau 0 persen.

Tingkat keikutsertaan perempuan dalam kegiatan kelompok di Kampung Kebon Kopi cenderung rendah. Mereka masih menganggap bahwa untuk mengikuti kegiatan kelompok atau perkumpulan yang ada di desa akan menyita banyak waktu sedangkan pekerjaan yang harus mereka lakukan setiap hari (domestik) sudah menyita waktu. Jauhnya tempat menjadi faktor penghambat utama bagi perempuan dalam mengikuti kegiatan. Tidak adanya angkutan umum menjadikan mereka malas untuk keluar rumah, walaupun ada mereka harus menggunakan ojek dan itu memerlukan uang yang lebih.

Tabel 12. Persentase Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok menurut Akses Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Akses*(%)				Akses*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	50	40	40	0	35	80	65
Tinggi	0	0	60	10	0	0	20	0
Total	0	50	100	50	0	35	100	65

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Hipotesis pada pengaruh keikutsertaan suami-istri di dalam kegiatan kelompok terhadap akses atas sumberdaya adalah semakin tinggi keikutsertaan suami-istri di dalam kelompok maka semakin tinggi akses rumahtangga atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Tabel 12 memperlihatkan bahwa faktor keikutsertaan suami-istri di dalam kelompok hanya mempengaruhi rumahtangga petani dan lebih tepatnya pada laki-laki. Pengaruh keikutsertaan suami-istri di dalam kegiatan kelompok pada rumahtangga petani terhadap akses adalah semakin sering mengikuti pelatihan dan penyuluhan maka mereka banyak mendapatkan informasi dan akses terhadap input pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida yang diberikan pada saat penyuluhan dan pelatihan serta mudah melakukan pinjaman pada kelompok tani.

Pada rumahtangga buruh tani, faktor keikutsertaan di dalam kelompok tidak mempengaruhi akses atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini karena akses yang mereka miliki rata-rata diberikan oleh pemilik lahan. sehingga para buruh tani hanya tinggal menggunakan akses sumberdaya yang telah disiapkan saja.

Tabel 13. Persentase Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok menurut Kontrol Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Keikutsertaan Suami-Istri di dalam Kegiatan Kelompok	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Kontrol*(%)				Kontrol*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	90	40	0	80	100	0	0
Tinggi	0	10	60	0	20	0	0	0
Total	0	100	100	0	100	100	0	0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan

Pengetahuan lokal dalam budidaya tanaman di lahan hutan diukur menjadi rendah dan tinggi. Pengetahuan lokal dalam budidaya tanaman di lahan hutan meliputi pengetahuan mengenai jenis tanaman yang sesuai dengan lahan, cara menanam, pengetahuan mengenai jenis pohon yang tidak boleh ditebang, dan waktu penebangan dan waktu panen. Sejak dahulu sistem tani hutan di Kampung Kebon Kopi adalah tumpang sari. Sebagian besar dari mereka masih mengikuti tata cara tanam yang mereka dapatkan secara turun temurun dari orang tua. Penganjuran untuk menerapkan sistem tumpang sari adalah untuk membuat tanah tetap subur. Hal ini karena lahan tidak hanya ditanami satu jenis tanaman sepanjang tahun tapi setiap setengah tahun diganti dengan tanaman lain. Setiap rumahtangga di Kampung Kebon Kopi mayoritas tidak menanam jenis tanaman yang sama selama musim untuk menghindari penyebaran hama pada tanaman mereka. Jenis tanaman yang biasanya mereka tanam paling banyak adalah sengon, afrika, dan bambu. Mereka tidak menanam cengkeh, petai

dan buah-buahan karena lahan mereka tidak cocok untuk tanaman tersebut.

Perintah dan larangan yang masih mereka pegang adalah tidak diperbolehkannya melakukan panen pada hari senin atau bertepatan pada hari lahir. Banyak diantara mereka yang masih mengikuti perintah dari leluhur. Salah satunya tidak melakukan penanaman pada hari senin. Diantara mereka percaya jika tidak melakukan salah satu perintah atau larangan tersebut berdampak tanaman yang mereka tanam akan terserang hama.

Persentase pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan pada rumahtangga petani dihitung 100 persen dari 10 KK yang terdiri dari 10 suami dan 10 istri sedangkan pada rumahtangga buruh tani persentase dihitung 100 persen dari 20 KK yang terdiri dari 20 suami dan 20 istri. Tabel 21 memperlihatkan bahwa laki-laki pada rumahtangga petani memiliki pengetahuan lokal tinggi dalam budidaya di lahan hutan sebanyak 80 persen dan mereka masih menerapkan pengetahuan tersebut dalam sistem pertaniannya sedangkan laki-laki pada rumahtangga buruh tani hanya 40 persen yang memiliki pengetahuan lokal tinggi dalam budidaya di lahan hutan dan masih menerapkan pengetahuan tersebut.

Rendahnya pengetahuan lokal dalam budidaya di lahan hutan yang dimiliki laki-laki pada rumahtangga buruh tani disebabkan oleh sebagian dari mereka awalnya bukanlah petani atau bukan merupakan penduduk asli dan sebagian lagi disebabkan oleh ketergantungan dengan para pemilik tanah yang lahannya mereka garap. Karena peraturan dalam sistem pertanian kadang dipegang sepenuhnya oleh para pemilik tanah.

Tabel 14. Persentase Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya di Lahan Hutan Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya di Lahan Hutan	Rumahtangga Petani* (%)		Rumahtangga Buruh Tani* (%)	
	Suami	Istri	Suami	Istri
Rendah	20	50	60	70
Tinggi	80	50	40	30
Total	100	100	100	100

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Perempuan pada rumahtangga petani memiliki pengetahuan lokal tinggi sebanyak 50 persen dan yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 50 persen. Perempuan pada rumahtangga buruh tani yang memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 30 persen dan yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 70 persen. Rendahnya pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan karena ketidaktahuan mereka, ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh perempuan jarang dikutsertakan dalam kegiatan pertanian dan orang tua ataupun suami mereka tidak memberikan pengetahuan tersebut kepada mereka.

Hipotesis pada pengaruh pengetahuan lokal suami-istri

dalam budidaya tanaman di lahan hutan terhadap akses atas sumberdaya adalah semakin tinggi pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan maka semakin tinggi akses rumahtangga atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Tabel 15. Persentase Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan menurut Akses Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Akses*(%)				Akses*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	30	20	20	0	35	60	35
Tinggi	0	20	80	30	0	0	40	30
Total	0	50	100	50	0	35	100	65

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Tabel 15 memperlihatkan bahwa faktor pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan hanya mempengaruhi rumahtangga petani dan lebih tepatnya pada laki-laki. Pengaruh pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan pada rumahtangga petani adalah semakin mereka mengetahui jenis tanaman apa yang cocok, cara menanam, jenis pohon yang tidak boleh ditebang, peraturan dan larangan yang ada maka semakin banyak pula pengetahuan mereka atas sumberdaya-sumberdaya yang dapat mereka akses. Pada rumahtangga buruh tani, faktor pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan tidak mempengaruhi akses atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan. Sebagian pada rumahtangga buruh tani baik laki-laki dan perempuan yang memiliki pengetahuan lokal, seringkali tidak menerapkannya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Penerapan sistem ataupun cara bertani hutan lebih banyak dipegang oleh pemilik lahan. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemilik lahan, jika menyerahkan sistem bertani pada mereka, barulah mereka menerapkan pengetahuan tersebut.

Hipotesis pada pengaruh pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan terhadap kontrol atas sumberdaya adalah semakin tinggi pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan maka semakin tinggi kontrol rumahtangga atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Tabel 16 memperlihatkan bahwa faktor pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan hanya mempengaruhi rumahtangga petani dan lebih tepatnya pada laki-laki. Pengaruh pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan pada rumahtangga petani terhadap kontrol adalah semakin tinggi pengetahuan yang mereka miliki dan mereka terapkan di dalam sistem tani hutan maka mereka dapat mengontrol atas sumberdaya-sumberdaya yang ada di lahan mereka yang sesuai dengan pengetahuan dan peraturan yang ada. Pada rumahtangga buruh tani, faktor pengetahuan lokal suami-istri dalam

budidaya tanaman di lahan hutan tidak mempengaruhi kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini karena mereka tidak memiliki kontrol sama sekali terhadap sumberdaya yang ada dan semua kontrol dikuasai oleh pemilik lahan yang lahan-lahannya mereka garap.

Tabel 16. Persentase Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan menurut Kontrol Rumahtangga Petani dan Buruh Tani, Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II Tahun 2012

Pengetahuan Lokal Suami-Istri dalam Budidaya Tanaman di Lahan Hutan	Rumahtangga Petani*				Rumahtangga Buruh Tani*			
	Kontrol*(%)				Kontrol*(%)			
	Rendah		Tinggi		Rendah		Tinggi	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Rendah	0	50	20	0	60	70	0	0
Tinggi	0	50	80	0	40	30	0	0
Total	0	100	100	0	100	100	0	0

Keterangan: jumlah KK Petani 10 (10 suami & 10 istri) dan Buruh Tani 20 KK (20 suami & 20 istri)

Berdasarkan tabulasi yang disajikan memperlihatkan bahwa faktor penguasaan lahan rumahtangga, keikutsertaan suami-istri dalam kegiatan kelompok, dan pengetahuan lokal suami-istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan hanya mempengaruhi rumahtangga petani terutama laki-laki. Tidak ada pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap akses dan kontrol yang dimiliki oleh rumahtangga buruh tani karena rata-rata akses dan kontrol dipegang sepenuhnya oleh pemilik lahan yang tanahnya mereka garap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rumahtangga buruh tani memiliki curahan waktu kerja lebih besar dibanding curahan waktu kerja yang dimiliki rumahtangga petani untuk profil aktivitas dalam satu hari. Laki-laki pada rumahtangga buruh tani memiliki curahan waktu tinggi pada kegiatan reproduktif dan sosial kemasyarakatan sedangkan untuk kegiatan produktif curahan waktu yang dimiliki sama besarnya dengan laki-laki pada rumahtangga petani. Perempuan pada rumahtangga buruh tani memiliki curahan waktu lebih tinggi pada kegiatan reproduktif dan produktif sedangkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan curahan waktu yang dimiliki lebih sedikit dibanding perempuan pada rumahtangga petani.
2. Kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan rakyat di Kampung Kebon Kopi Desa Gunung Bunder II meliputi: (a) pemilihan jenis tanaman, (b) pengadaan bibit, (c) penanaman bibit ke lahan, (d) pemeliharaan tanaman, (e) penebangan, (f) penanaman kembali, (g) penanaman tanaman sela, dan (h) pemasaran hasil panen. Sumberdaya dalam kegiatan tersebut

meliputi: (a) lahan, (b) peralatan, (c) inpur pertanian, (d) tenaga kerja, (e) modal/pinjaman, (f) pelatihan, dan (g) pemasaran. Rumahtangga buruh tani memiliki akses lebih tinggi atas sumberdaya dibanding akses yang dimiliki oleh rumahtangga petani dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Semua laki-laki pada rumahtangga buruh tani memiliki akses atas semua sumberdaya sedangkan laki-laki pada rumahtangga petani lebih sedikit memiliki akses pada sumberdaya alat kerja dan tenaga kerja. Perempuan pada rumahtangga buruh tani memiliki akses atas semua sumberdaya sedangkan perempuan pada rumahtangga petani tidak memiliki akses atas sumberdaya pemasaran. Pada kontrol, rumahtangga petani memiliki kontrol lebih tinggi atas sumberdaya dibanding kontrol yang dimiliki oleh rumahtangga buruh tani. Semua laki-laki pada rumahtangga petani memiliki kontrol atas semua sumberdaya sedangkan laki-laki pada rumahtangga buruh tani hanya memiliki kontrol atas sumberdaya pelatihan dan pemasaran. Perempuan pada rumahtangga petani memiliki kontrol atas sumberdaya pemasaran sedangkan perempuan pada rumahtangga buruh tani tidak memiliki kontrol sama sekali atas semua sumberdaya.

3. Faktor penguasaan lahan rumahtangga, keikutsertaan suami-istri dalam kegiatan kelompok dan pengetahuan lokal suami istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan mempengaruhi akses kontrol pada rumahtangga petani terlebih pada laki-laki sedangkan pada rumahtangga buruh tani faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi akses dan kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah terutama badan penyuluhan untuk lebih memperhatikan kegiatan penyuluhan mengenai pertanian terutama tani hutan di daerah dalam/daerah tepat di bawah kaki gunung dan daerah yang memiliki hutan-hutan rakyat, sehingga pengetahuan masyarakat dapat terus bertambah dan masyarakat dapat mengelola hutan rakyat dengan keterampilan yang diberikan.
2. Keterbatasan pada penelitian ini adalah waktu dalam penelitian sehingga kurang memperdalam peran anggota keluarga lainnya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat dan perbedaan akses kontrol rumahtangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian akses kontrol rumahtangga dengan mengikutsertakan peran anggota keluarga dan rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri 2007, Manajemen Hutan Rakyat Kolaboratif di Tingkat Kawasan.(file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal%20SP/manajemen-hutan-rakyat-kolaboratif-di-tingkat-kawasan.html) [diakses 21 Desember 2011].

- Biro Pusat Statistik 2011, Pamijahan in Figure 2011. Bogor: BPS.
- Dephut 2004, Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (http://www.dephut.go.id/files/11_5_p03_04.pdf) [diakses 21 Desember 2011].
- [DJPK] Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2009, Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008, Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press.
- Kartasubrata, J., Setiawan Sunito dan Didik Suharjito 1995, Social Forestry Programme In Java. A State Of The Art Report. Research Support To Perhutanan Social Program On Forestland In Java 1984-1992. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mitchell, B., B. Setiawan dan Dwita HR. 2007, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mugniyasyah, SS. 1995, Konsep dan Analisis Gender dalam Program Pembangunan. Bogor: Lembaga Penelitian IPB.
- Palit, Maria A. 2009, Status dan Peran Wanita Tani Etnik Papua Dalam Pengambilan Keputusan Rumah tangga di Distrik Sentani Kabupaten Sentani Provinsi Papua. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Romansah, Dadang 2007, Peran Hutan Rakyat dalam Perekonomian Wilayah di Sumedang. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sayogyo, Pudjiwati 1986, Penelitian Integrasi Wanita Pedesaan di dalam Proses Pembangunan di Jawa Barat 1983-1984. Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Sihombing, Tetty P. 2011, Analisis Pengelolaan Tanaman Kemiri Rakyat di Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi 1989, Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Stephani, Claudia 2009, Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus RPH Tanjungkerta BKPH Tampomas KPH Sumedang Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten). [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suharjito, Didik dan Sarwititi. 1997, Organisasi Keluarga dan Status Wanita: (Studi Kasus Peranan Wanita Pada Keluarga Penyadap Getah Pinus dan Keluarga Petani Hutan Rakyat). Bogor: Lembaga Penelitian IPB.
- Suhendang, E. 2002, Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor: YPFK.
- Sumedi, Nur n.d. Mengelola Hutan Rakyat (Silvikultur-Pemasaran): Belajar dari Pengalaman. [Prosiding]. Ciamis. (www.dephut.go.id/files/6.pdf) [diakses 21 Desember 2011].
- Suwardi, Megawaty 2010, Analisis Gender dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat dan Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Pendapatan Rumah tangga (Studi Kasus Hutan Rakyat di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tamyis, Rosidha A. 2006, Analisis Gender dalam Kegiatan PHBM (Studi Kasus PHBM Desa Lolong, Kec. Karanganyar Jawa Tengah). Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Vitalaya S. Hubeis, Aida. 2010, Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Wigna, Winati, Nuraini W. Prasodjo dan Melani A. Sunito. 2010, Modul Mata Kuliah: Gender dan Pembangunan. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. [Bahan tidak dipublikasikan].
- [WHO] World Health Organization 2012, What Do We Mean By "Sex" and "Gender"? [Artikel]. (<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>) [diakses 8 Agustus 2012].